

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung kebijakan pengelolaan anggaran yang menitikberatkan pada efisiensi penggunaan keuangan negara. Sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas strategis melalui alokasi dana untuk pelatihan tenaga pengajar, pembenahan fasilitas, dan penguatan infrastruktur pendidikan. Mengingat kebijakan ini berpotensi memengaruhi stabilitas operasional di institusi pendidikan tinggi, maka analisis mendalam mengenai efisiensi anggaran negara pada periode ini menjadi sangat relevan untuk dikaji dalam konteks akademik (Fadilah 2025).

Pemerintah Indonesia saat ini menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tekanan beban utang nasional yang signifikan. Sebagai langkah mitigasi, diterapkan kebijakan efisiensi anggaran yang berfokus pada optimalisasi sumber daya keuangan di sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan ideal antara akselerasi pembangunan nasional dengan keterbatasan fiskal yang ada. (Ikbal 2025).

Urgensi efisiensi anggaran muncul sebagai respons atas krisis fiskal yang dipicu oleh akumulasi utang luar negeri dan ketidakpastian ekonomi global. Dalam kondisi ini, penghematan belanja negara menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas keuangan dan mencegah defisit yang kian melebar. Melalui minimalisasi pemborosan dan optimalisasi dana publik, efisiensi bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan keharusan dalam tata kelola keuangan negara yang bertanggung jawab demi menjamin tercapainya target pembangunan (Praycilia 2021).

Momentum efisiensi anggaran di Indonesia diperkuat melalui kebijakan *refocusing* dan realokasi sejak pandemi (Inpres No. 4 Tahun 2020), yang menggeser paradigma menuju kualitas belanja (*spending better*). Komitmen ini dilanjutkan secara masif dalam pemerintahan Presiden Prabowo melalui

Inpres No. 1 Tahun 2025, yang menginstruksikan efisiensi fiskal sebesar Rp306 triliun. Melalui pemotongan belanja non-prioritas seperti biaya perjalanan dinas dan honorarium, pemerintah berupaya mengoptimalkan ruang fiskal untuk mendanai sektor vital seperti pendidikan dan kesehatan guna memastikan setiap rupiah memberikan kemanfaatan publik yang maksimal (Samuel 2025).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menekankan pentingnya ketaatan dalam aturan anggaran melalui pengurangan belanja non-produktif, seperti perjalanan dinas yang tidak memiliki hasil nyata yang jelas. Kebijakan ini bertujuan mewujudkan sistem keuangan negara yang sehat, berkelanjutan, dan memiliki daya saing global. Sebagai tindak lanjut, setiap kementerian dan lembaga kini diwajibkan untuk mereformasi tata kelola anggaran mereka dengan mengedepankan prinsip transparansi dalam setiap penggunaan dana publik (Subekti 2025).

Dalam perspektif *Siyasah maliyah*, efisiensi anggaran merupakan strategi pengaturan keuangan untuk mencapai kemaslahatan umum. Prinsip ini merefleksikan tata kelola masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana Baitul Mal berfungsi secara ketat dalam mengontrol pengeluaran demi kesejahteraan rakyat. Dalam konteks institusi pendidikan, efisiensi bukan sekadar penghematan, melainkan bentuk amanah dalam mengelola dana negara secara transparan. Oleh karena itu, proses penyesuaian anggaran agar lebih masuk akal dan efektif harus tetap berorientasi pada kepentingan publik tanpa mengorbankan kualitas pengajaran sebagai hak dasar akademik (Fatmawati n.d.).

Kebijakan efisiensi anggaran memberikan tantangan nyata bagi Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Azhariah Khalida (Wakil Dekan II Fakultas Syariah), kebijakan ini memiliki dampak seperti pemangkasan anggaran dosen peneliti (Khalida, 2025). Sebagai Perguruan Tinggi Islam utama di Sumatera Barat, UIN Imam Bonjol menjadi lokasi penelitian yang relevan untuk mengkaji bagaimana

mutu dan kejujuran akademik tetap terjaga di tengah keterbatasan dana. Selain faktor dampak anggaran, pemilihan lokasi ini didasarkan pada aksesibilitas data serta posisi strategis institusi dalam pendidikan tinggi keagamaan di Indonesia.

Kebijakan efisiensi membawa dampak signifikan pada bentuk/struktur anggaran UIN Imam Bonjol Padang. Berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 2025 dan surat teknis Dirjen Pendis, alokasi dana institusi yang semula diproyeksikan sebesar Rp254,6 miliar mengalami penataan ulang menjadi Rp194,2 miliar. Pengurangan sebesar Rp60,4 miliar atau sekitar 23,7% ini menciptakan tantangan manajerial yang besar. Dengan hilangnya hampir seperempat anggaran operasional, manajemen kampus dipaksa melakukan penyesuaian belanja secara selektif agar program prioritas tetap berjalan optimal di tengah ketersediaan dana yang dapat dibelanjakan yang lebih terbatas (Inpres No. 1 Tahun 2025) (Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: B-135/DJ.I/KU.00.2/02/2025).

Penyesuaian anggaran ini berdampak langsung pada berbagai aspek operasional di UIN Imam Bonjol Padang melalui pengurangan dana untuk program non-prioritas. Dampak yang paling dirasakan meliputi penghentian program internasional, pengurangan dana pengembangan mahasiswa, serta pemangkasan anggaran kegiatan Ormawa (Organisasi Mahasiswa). Selain itu, pengurangan biaya perjalanan dinas bagi dosen peneliti turut menghambat mobilitas akademik, sehingga berpotensi menurunkan produktivitas penelitian institusi (Pradana 2025).

Keterbatasan anggaran mulai berdampak pada penyempitan ruang pengembangan kompetensi akademik mahasiswa, terutama melalui peniadaan berbagai kegiatan berbasis internasional. Kondisi ini merupakan implikasi langsung dari kebijakan fiskal (kebijakan keuangan negara) di era Presiden Prabowo yang memprioritaskan efisiensi belanja negara melalui pemangkasan biaya perjalanan dinas dan operasional. Akibatnya, dana pendukung pengabdian masyarakat dan forum ilmiah di tingkat kampus

harus dikurangi demi mematuhi perintah/instruksi resmi penghematan tersebut. Fenomena di tingkat institusi ini mencerminkan agenda pengetatan anggaran nasional yang memaksa sektor pendidikan tinggi untuk beradaptasi dengan keterbatasan sumber daya sepanjang tahun 2025 (Primaresti 2025).

Penelitian ini menjadi sangat penting karena kebijakan efisiensi anggaran berisiko menghambat misi UIN sebagai lembaga pendidikan Islam jika tidak dikelola berdasarkan prinsip *Siyasah maliyah*. Secara istilah, *Siyasah maliyah* menekankan pengaturan keuangan demi kemaslahatan umum tanpa mengabaikan hak-hak individu. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan perspektif syariah dalam memastikan distribusi anggaran tetap berorientasi pada kepentingan publik. Mengingat keterbatasan data angka, penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara untuk memahami dampak kebijakan secara komprehensif (luas dan menyeluruh) (Fatmawati n.d.)

Dalam perspektif *siyasah maliyah*, efisiensi anggaran adalah pengaturan pendapatan dan belanja yang berorientasi pada kesejahteraan warga kampus. Mengambil teladan kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, pengelolaan keuangan wajib mengedepankan amanah dengan memisahkan kepentingan pribadi dari harta negara. Kebijakan ini menekankan bahwa rasionalisasi tidak boleh mengorbankan hak dasar dosen maupun mahasiswa. Dengan mengadopsi fungsi pengawasan lembaga *Baitul Mal*, efisiensi di UIN harus tetap tepat sasaran demi menjaga kemaslahatan serta menjamin visi akademik tetap terjaga di tengah keterbatasan fiskal (Fatmawati n.d.).

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “Dampak Efisiensi Anggaran Masa Pemerintahan Presiden Prabowo Terhadap Keberlangsungan Kegiatan Akademik UIN Imam Bonjol Padang Perspektif *Siyasah maliyah*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijabarkan pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana dampak kebijakan efisiensi anggaran pemerintahan Presiden Prabowo terhadap keberlangsungan kegiatan akademik UIN Imam Bonjol Padang dan kaitannya dengan *siyasah maliyah*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk memudahkan dalam menemukan data pada penelitian ini, maka disusun beberapa pertanyaan yang akan menjadi fokus utama dalam menganalisis dampak kebijakan efisiensi anggaran masa pemerintahan Presiden Prabowo terhadap keberlangsungan kegiatan akademik di UIN Imam Bonjol Padang dengan pendekatan *siyasah maliyah*:

- 1.3.1 Apa saja bentuk-bentuk efisiensi anggaran terhadap keberlangsungan akademik di UIN Imam Bonjol Padang?
- 1.3.2 Apa dampak efisiensi anggaran terhadap kegiatan akademik di UIN Imam Bonjol Padang?
- 1.3.3 Sejauh mana kesesuaian prinsip *siyasah maliyah* dengan kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah khususnya dalam bidang pendidikan tinggi?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1.4.1. Untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk efisiensi anggaran yang diterapkan di UIN Imam Bonjol Padang
- 1.4.2. Untuk mengetahui dampak efisiensi anggaran terhadap kegiatan akademik di UIN Imam Bonjol Padang.
- 1.4.3. Untuk menganalisis kebijakan efisiensi anggaran pemerintah sesuai dengan prinsip *siyasah maliyah* dalam konteks pendidikan tinggi.

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting untuk memahami dampak kebijakan efisiensi anggaran masa pemerintahan Presiden Prabowo terhadap keberlangsungan kegiatan akademik di UIN Imam Bonjol Padang. Dengan pendekatan *siyasaḥ maliyah*, penelitian ini memberikan perspektif syari'ah dalam menilai keadilan dan kemaslahatan distribusi anggaran pendidikan, serta menganalisis pengaruh kebijakan tersebut terhadap kualitas pendidikan di Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK).

1.6 Studi Literatur

Setelah melakukan penelusuran secara cermat terhadap penelitian yang ada, belum ditemukan studi yang secara khusus membahas dampak kebijakan efisiensi anggaran pada masa pemerintahan Presiden Prabowo terhadap keberlangsungan kegiatan akademik di UIN Imam Bonjol Padang. Namun demikian, terdapat beberapa penelitian terkait yang dapat menjadi landasan akademik untuk penelitian ini, di antaranya:

Pertama, penelitian (Salman & Ikbal, 2025) berjudul “Analisis Efektivitas Kebijakan Efisiensi Anggaran: Ditinjau Dari Aspek Ekonomi”. Penelitian ini menganalisis bagaimana efisiensi anggaran sebagai respons atas tekanan keuangan negara memengaruhi stabilitas ekonomi dan pelayanan publik. Temuan menunjukkan bahwa efisiensi mampu memperbaiki struktur anggaran jika didukung perencanaan berbasis kinerja. Namun, penulis memperingatkan bahwa pemotongan yang bersifat administratif atau sekadar angka tanpa analisis dampak dapat menurunkan kualitas layanan dasar seperti pendidikan. Hal ini menjadi landasan penting bagi UIN Imam Bonjol Padang bahwa efisiensi harus berbasis pada outcome agar tidak menjadi justru merugikan terhadap produktivitas akademik institusi.

Kedua, penelitian (Ticoalu & Supriyono, n.d.) berjudul “Analisis Efisiensi Pengelolaan Biaya dengan Penerapan Activity Based Management (Studi Pada Jasa Rawat Inap RSUD Kota Yogyakarta)”. Penelitian ini menelaah

penggunaan metode *Activity Based Management* (ABM) untuk mengidentifikasi aktivitas *value-added* (bernilai tambah) dan *non-value added* (tidak bernilai tambah) demi mencapai efisiensi tanpa menurunkan kualitas layanan. Temuan menunjukkan bahwa mengeliminasi aktivitas yang tidak menambah nilai dapat mengurangi pemborosan secara signifikan. Keterkaitan penelitian ini bagi UIN Imam Bonjol Padang adalah pentingnya pemilahan aktivitas akademik secara selektif. Hal ini diperlukan agar kebijakan efisiensi tidak secara keliru menghapus kegiatan yang justru menjadi kunci bagi kualitas pendidikan dan produktivitas institusi.

Ketiga, penelitian (Primaresti, 2025) berjudul “Efisiensi Anggaran Era Prabowo: Analisis Kekuasaan dan Kepentingan Elite”. Penelitian ini mengkritisi implementasi Inpres No. 1 Tahun 2025 yang dinilai timpang, karena memangkas anggaran pendidikan secara drastis namun meningkatkan alokasi untuk sektor keamanan dan politik. Tanpa indikator yang jelas, kebijakan ini rentan terhadap pemanfaatan sumber daya negara untuk keuntungan kelompok tertentu. Dampak nyatanya terlihat pada pengurangan beasiswa KIP-Kuliah serta tunjangan tenaga pendidik. Hal ini sangat relevan bagi UIN Imam Bonjol Padang sebagai peringatan bahwa efisiensi yang didorong oleh pilihan politik dapat menghambat akses pendidikan dan kesejahteraan akademik yang bersifat objektif berdasarkan kebutuhan nyata.

Keempat, penelitian (Darmawan et al., 2025) berjudul “Efisiensi Anggaran dan Dampaknya terhadap Praktik Good Governance di Kementerian Dalam Negeri dalam Era Reformasi Birokrasi”. Penelitian ini menganalisis efisiensi anggaran sebagai instrumen untuk memperkuat kontrol keuangan dan kepercayaan publik melalui transparansi. Namun, tantangan seperti penolakan birokrasi dan krisis kepercayaan publik dapat muncul jika pemangkasan dilakukan secara tidak adil. Hal ini memperkuat urgensi bagi UIN Imam Bonjol Padang untuk menjaga tanggung jawab agar

penghematan tidak mengorbankan kualitas akademik. Sejalan dengan pemikiran Mikesell (2011), diingatkan bahwa penghematan yang hanya berfokus pada biaya operasional tanpa melihat dampak jangka panjang dapat merusak mutu layanan. Teori ini menjadi acuan penting untuk mengkaji bagaimana kebijakan era Presiden Prabowo memengaruhi operasional di UIN Imam Bonjol Padang.

Kelima, penelitian oleh Schick (1998) yang berjudul *"Budgeting for Results: Recent Developments in Five Industrialized Countries"*. Studi ini mengemukakan bahwa efisiensi anggaran yang berlebihan tanpa pendekatan partisipatif dapat memicu resistensi dan fragmentasi dalam organisasi publik, termasuk perguruan tinggi. Temuan ini relevan untuk memahami tantangan yang mungkin dihadapi UIN Imam Bonjol Padang dalam menyesuaikan diri dengan kebijakan penghematan anggaran pemerintah.

Keenam, berita harian Suarakampus.com (2025) dengan judul *"DIPA Anggaran 2025, Alami Penurunan Faktor Efisiensi"* mengkaji dampak pemangkasan anggaran di UIN Imam Bonjol Padang pada tahun 2025. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemangkasan anggaran sebesar Rp 60,414 miliar berdampak signifikan terhadap sumber dana utama kampus, yaitu Rupiah Murni (RM) dan Badan Layanan Umum (BLU). Pengurangan dana ini menyebabkan keterbatasan dalam pembiayaan kegiatan tri darma perguruan tinggi seperti penelitian dan peningkatan fasilitas akademik. Hasil penelitian ini relevan untuk memahami bagaimana efisiensi anggaran yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo berpotensi menghambat keberlangsungan kegiatan akademik di UIN Imam Bonjol Padang apabila tidak dilakukan penyesuaian strategi pengelolaan keuangan yang tepat.

Berdasarkan tinjauan pustaka di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai dampak efisiensi anggaran di UIN Imam Bonjol Padang, khususnya pada bidang akademik, belum pernah dilakukan sebelumnya. Gap penelitian

(celah atau kekosongan penelitian) ini terletak pada analisis spesifik mengenai pengaruh kebijakan tersebut terhadap keberlangsungan kegiatan kampus. Penelitian ini akan mengisi celah tersebut dengan mengkaji dampak nyata efisiensi anggaran terhadap kualitas fasilitas, produktivitas tenaga pengajar, hingga efektivitas proses pembelajaran secara menyeluruh.

1.7 Kerangka Teori

1.7.1 Kebijakan Efisiensi Anggaran

1.7.1.1 Teori Pembuatan Kebijakan (*Policy-making Theories*)

Kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan terencana yang bertujuan mencapai sasaran besar, melampaui sekadar pengambilan keputusan tunggal. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo dan Anderson, pembuatan kebijakan memiliki cakupan yang lebih luas daripada pengambilan keputusan jika pengambilan keputusan adalah proses memilih antar alternatif, maka kebijakan adalah "kerangka besar" yang menaunginya. Proses ini tidak bersifat netral karena melibatkan tarik-menarik berbagai kepentingan. Dalam realitasnya, kebijakan bersifat terus bergerak dan berubah melalui proses timbal balik dengan lingkungannya, di mana kebijakan saat ini akan membentuk situasi yang memengaruhi keputusan di masa depan (Muadi, et al).

1.7.1.2 Teori Aktor Kebijakan (*Policy Actors Theories*)

Teori ini memandang bahwa keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada interaksi antar-individu atau lembaga yang terlibat. Fokus utamanya adalah membedah hubungan antara pemerintahan yang memiliki kekuasaan resmi berdasarkan hukum dengan penerima dan pelaksana dampaknya yang membawa kepentingan sosial maupun ekonomi. Dalam kerangka ini, implementasi kebijakan menjadi arena interaksi yang terus bergerak, di mana setiap pihak dipetakan berdasarkan kekuatan dan kepentingannya. Pemahaman terhadap

pengelompokan berdasarkan ciri khas aktor mulai dari pemain kunci hingga subjek yang terdampak menjadi sangat krusial karena aliansi atau benturan kepentingan di antara mereka akan menentukan apakah kebijakan tersebut mencapai tujuan idealnya atau justru terhambat di lapangan (Febri 2022).

1.7.1.3 Teori Analisis Kebijakan (*Policy Analysis Theories*)

Analisis kebijakan berfungsi sebagai jembatan intelektual yang mengubah data mentah menjadi wawasan strategis bagi para pengambil keputusan. Proses ini bertujuan menyederhanakan masalah yang kompleks agar menghasilkan informasi yang tepat sasaran dan objektif. Dalam praktiknya, analisis ini sering menggunakan dua pendekatan utama: model rasional komprehensif (evaluasi mendalam terhadap semua pilihan berdasarkan data lengkap) atau model inkremental (perbaikan kebijakan secara bertahap). Melalui pengumpulan data dan evaluasi alternatif, analisis kebijakan memastikan bahwa tindakan pemerintah termasuk efisiensi anggaran tidak didasarkan pada kepentingan sesaat, melainkan pada kelayakan operasional dan kinerja yang matang demi kepentingan publik (Warlina n.d.).

1.7.2 *Siyasah Maliyah* dalam Konteks Kebijakan Publik

Siyasah maliyah menawarkan kerangka strategis dalam mengatur pendapatan dan belanja negara untuk mewujudkan *mashlahah 'ammah* (kemaslahatan publik) tanpa mengabaikan hak individu. Pendekatan ini memandang tata kelola keuangan sebagai pilar utama keberhasilan pelayanan publik. Bercermin pada era Khulafaur Rasyidin, efisiensi anggaran bukan berarti pemangkasan biaya yang merusak, melainkan penerapan prinsip amanah dan ketelitian yang ketat. Kepemimpinan Abu Bakar dan Umar bin Khattab memberikan teladan bahwa efisiensi sejati adalah

ketepatan alokasi dana demi kesejahteraan rakyat, dengan menjaga batas moral yang tegas antara kepentingan pribadi dan aset negara.

Kebijakan efisiensi sering kali memicu dilema antara keterbatasan anggaran dengan tuntutan kualitas akademik. Melalui pendekatan *Siyasah maliyah*, pengaturan keuangan dijadikan instrumen untuk mendukung kemaslahatan civitas akademika. Pengambil kebijakan dituntut cermat dalam memprioritaskan anggaran agar hak-hak dosen dan mahasiswa tidak tereliminasi akibat proses penataan ulang anggaran. Implementasi efisiensi harus berpijak pada nilai *Al-'Adl* guna memastikan setiap keputusan pejabat tetap melindungi hak warga negara. Oleh karena itu, fungsi pengawasan yang kaku/sangat ketat seperti konsep *Baitul Mal* menjadi variabel kunci untuk menjamin transparansi serta mengurangi risiko potensi penyelewengan dalam institusi.

Secara mendasar, penerapan *Siyasah maliyah* dalam kebijakan pendidikan menegaskan bahwa efisiensi adalah bentuk tanggung jawab moral dan administratif yang luhur. Dengan memprioritaskan kebutuhan yang paling mendesak bagi kepentingan umum, institusi pendidikan dapat mempertahankan mutu dan visi akademiknya meski sedang mengalami pengurangan anggaran. Sinergi antara ketelitian manajerial dan pemenuhan hak individu merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang adil, stabil, dan berkelanjutan (Fatmawati n.d.).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini berlokasi di UIN Imam Bonjol Padang dengan menerapkan metode hukum empiris. Melalui pengumpulan data primer, pendekatan ini bertujuan membedah dampak konkret kebijakan efisiensi anggaran terhadap kegiatan akademik secara nyata. Dengan metode ini, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran berdasarkan fakta

sebenarnya dan dapat diterapkan sebagai solusi terhadap fenomena yang terjadi di institusi.

1.8.2 Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan, penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu sebagai berikut :

1.8.2.1 Sumber Data Primer

Guna menjamin validitas dan pertanggungjawaban penelitian, data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber utama di UIN Imam Bonjol Padang. Informan penelitian ini terdiri dari pihak Rektorat selaku pemangku kebijakan universitas (Lukmanul Hakim), jajaran Fakultas yang mencakup pimpinan dekanat dan staf keuangan (Rina Asmara dan Alfadli), serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) (Aulia Rahmat). Selain itu, narasumber juga mencakup mahasiswa yang merupakan pengurus Organisasi Mahasiswa (Ormawa) serta peserta program terdampak, di antaranya Ketua SEMA Fakultas Syariah (Hilal Hamdi), Gubernur DEMA Ushuluddin (Fadli Albukhaari), Gubernur DEMA FEBI (Akram), dan mahasiswa peserta riset internasional (Farra Tazkiyatun) Proses ini dilakukan untuk menggali informasi mendalam mengenai mekanisme pengaturan ulang alokasi anggaran serta dampaknya secara langsung terhadap seluruh aktivitas akademik di kampus.

Peneliti melakukan observasi lapangan untuk menyelaraskan hasil wawancara dengan fakta kenyataan sebenarnya di lingkungan kampus, terutama pada kondisi fasilitas, agenda akademik, dan dinamika organisasi mahasiswa. Sebagai langkah pengecekan keabsahan data dari berbagai sumber, peneliti juga melakukan studi dokumentasi terhadap laporan keuangan dan surat edaran resmi. Penyatuan ketiga teknik ini wawancara, observasi, dan dokumentasi memastikan bahwa analisis dampak efisiensi anggaran dilakukan

secara akurat, menyeluruh, dan dapat dipercaya (Sulung 2024).

1.8.2.2 Sumber Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk membangun fondasi analisis yang dapat dipercaya. Landasan utamanya meliputi aturan resmi/berwenang seperti Pasal 23 UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Secara teknis, penelitian merujuk pada Inpres No. 1 Tahun 2025 tentang penghematan fiskal, yang diturunkan melalui Surat Dirjen Pendis dan Surat Rektor UIN Imam Bonjol Padang mengenai penyesuaian pagu (batas atas) anggaran 2025. Seluruh regulasi ini menjadi basis *yuridis* (hukum) untuk meninjau apakah kebijakan efisiensi tersebut sudah selaras dengan prinsip *Siyasah maliyah*, yakni menjaga kemaslahatan umum tanpa mengabaikan hak-hak individu.

Guna memberikan penjelasan mendalam, bahan hukum sekunder seperti literatur ilmiah dan jurnal riset diintegrasikan untuk membedah dampak nyata penataan ulang anggaran terhadap kualitas layanan kampus. Dalam perspektif *siyasah maliyah*, rujukan ini membantu peneliti menyusun kerangka pemikiran tentang efisiensi yang berbasis pada prinsip keadilan (*al-'adl*). Selain itu, bahan hukum tersier serta informasi dari media kredibel seperti *Suarakampus.com* digunakan untuk memvalidasi fakta empiris mengenai penurunan anggaran pada DIPA UIN Imam Bonjol Padang, yang secara spesifik berdampak pada pagu anggaran di tingkat Fakultas serta pemotongan dana penelitian pada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M). Melalui penyelarasan seluruh sumber tersebut, penelitian ini menghadirkan kesimpulan menyeluruh tentang kebijakan pendidikan yang akuntabel, dengan mengedepankan prinsip amanah sebagai indikator utama keberhasilan efisiensi. (Sulung 2024).

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan untuk menyelesaikan penelitian adalah dengan cara sebagai berikut :

1.8.3.1 Wawancara

Dalam penelitian ini, teknik wawancara akan dilakukan dengan pendekatan semi-terstruktur untuk memastikan keluwesan dialog sambil tetap mencakup semua aspek penting yang relevan. Wawancara dapat dilaksanakan secara tatap muka atau virtual, tergantung pada kesediaan dan kenyamanan narasumber. Panduan wawancara akan disusun dengan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan narasumber untuk memberikan elaborasi mendalam, seperti "Bagaimana kebijakan efisiensi anggaran memengaruhi alokasi dana untuk penelitian dosen?"

Dalam penelitian ini, beberapa narasumber sudah diwawancarai, yang terdiri dari berbagai pihak terkait di UIN Imam Bonjol Padang, yaitu:

- a. Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M. Ag selaku Wakil Rektor UIN Imam Bonjol Padang.
- b. Bapak Dr. Alfadli M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah pengambil kebijakan di tingkat fakultas.
- c. Bapak Aulia Rahmat, SHI., MA.Hk. selaku Ketua Peneliti di UIN Imam Bonjol Padang diwawancarai guna mendapatkan pandangan mengenai dampak dan bentuk kebijakan efisiensi anggaran terhadap institusi.
- d. Ibu Rina Asmara Agung AY, SE., M. SI., AK selaku Bendahara Fakultas yang memberikan data pengeluaran dan pemotongan tentang kebijakan dalam bentuk dokumen resmi yang mencakup data pemotongan semua fakultas serta wawancara langsung yang menjelaskan dapat mempengaruhi program akademik dan alokasi dana di tingkat fakultas.

- e. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag selaku Dosen yang melakukan Penelitian.
- f. Ibu Dr. Azhariah Khalida, M. Ag selaku mantan Wakil Dekan 2 Fakultas Syari'ah (data awal penelitian).
- g. Hilal Hamdi sebagai Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Syariah.
- h. Akram sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- i. Fadhil sebagai Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Ushuluddin.
- j. Alfinno sebagai Ketua Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Dakwah.
- k. Rabiul Farra perwakilan mahasiswa dari Fakultas Adab yang ikut serta melakukan penelitian ke luar negeri yaitu ke Sydney Australia.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat mendengar langsung pengalaman dan pandangan mereka mengenai perubahan yang terjadi akibat kebijakan efisiensi anggaran. Pemilihan narasumber ini mendapatkan pandangan yang komprehensif dan beragam mengenai dampak serta bentuk-bentuk kebijakan efisiensi anggaran di UIN Imam Bonjol Padang. Dengan melibatkan berbagai *stakeholder*, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam tentang tantangan serta strategi yang dihadapi dalam konteks pendidikan tinggi di era pemerintahan Presiden Prabowo.

1.8.3.2 Dokumentasi

Peneliti menggunakan teknik analisis dokumen untuk menelusuri akar kebijakan dan landasan *yuridis* (hukum) efisiensi anggaran di UIN Imam Bonjol Padang. Analisis ini berpijak pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang menetapkan penghematan keuangan negara nasional sebesar Rp306 triliun. Secara

spesifik, penelitian ini membedah dua dokumen operasional utama: Surat Dirjen Pendis Nomor: B-135/DJ.I/KU.00.2/02/2025 dan Surat Rektor UIN Imam Bonjol Padang Nomor: B.387/Un.13/R/B.II/OT.01.4/02/2025. Kedua dokumen tersebut merupakan pedoman resmi yang menginstruksikan penyesuaian anggaran di tingkat universitas sepanjang tahun 2025.

Analisis dokumen mengungkap adanya perintah resmi pengetatan anggaran melalui pemangkasan biaya perjalanan dinas hingga 50% dan pembatasan honorarium (upah pembayaran jasa). Kebijakan ini menjadi dasar hukum bagi penghapusan program strategis serta pengurangan dukungan dana bagi Ormawa. Selain itu, kebijakan ini merasionalkan pemotongan biaya riset dosen. Melalui analisis ini, peneliti memetakan bagaimana instruksi pusat diubah bentuk ke dalam aturan internal kampus, serta mengevaluasi dampaknya terhadap penurunan mobilitas akademik dan hambatan kolaborasi riset internasional di UIN Imam Bonjol Padang.

1.8.4 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif dengan pendekatan analisis isi (*content analysis*) untuk mengolah informasi dari wawancara dan dokumen resmi. Melalui teknik deskriptif kualitatif, peneliti memaparkan temuan lapangan secara objektif dan komprehensif (menyeluruh). Seluruh data, mulai dari transkrip wawancara hingga dokumen kebijakan, disusun secara sistematis agar informasi menjadi terstruktur dan mudah untuk ditafsirkan.

Peneliti telah mengumpulkan data primer melalui wawancara dengan berbagai unsur civitas akademika UIN Imam Bonjol Padang, seperti dosen peneliti, bendahara Fakultas, dan pimpinan Ormawa. Dalam pelaksanaannya, peneliti menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses dan variasi respons dari para informan. Beberapa pihak merasa tidak memiliki kapasitas informasi yang memadai, sementara kesibukan akademis menyebabkan

jawaban yang diberikan cenderung bersifat umum. Peneliti memandang situasi ini bukan sebagai kendala personal, melainkan sebagai refleksi dari terbatasnya transparansi informasi teknis di tingkat tertentu.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan pengolahan dengan mengelompokkan informasi ke dalam kategori berdasarkan tema tertentu, terutama mengenai bentuk efisiensi dan dampaknya bagi institusi. Mengingat data dokumen resmi didominasi oleh angka-angka fiskal (keuangan), peneliti melakukan perubahan bentuk melalui penjabaran naratif-kualitatif (penjelasan dalam bentuk cerita atau uraian kata). Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi metode penelitian, sehingga data angka tersebut dapat dimaknai secara mendalam untuk menggambarkan realitas kebijakan yang terjadi di lapangan.

